



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1066-1077

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pengelolaan Dana BOSNAS dan BOSDA SMA Negeri di Kota Samarinda Terhadap Kinerja Keuangan Sekolah

Akbar Lufi Zulfikar^{1✉}, Swadia Gandhi Mahardika^{2*}, Selly Swandari³

(1), (2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

(3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda

Email: Swdiamahardika@feb.unmul.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) terhadap Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam hal ini adalah pengeluaran/keadaan Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) terhadap Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda. Penelitian ini adalah sebanyak 18 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda telah memenuhi regulasi yang telah ditetapkan Pengelolaan keuangan dalam hal ini adalah pengeluaran/realisasi Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdampak terhadap Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda. Dana yang dialokasikan untuk 18 sekolah yang ada di kota Samarinda yang bersumber dari BOSNAS dan BOSDA berjumlah Rp. 27.917.500.000,- sementara realisasi sebesar Rp. 24.586.745.984,- atau sebesar 88%. Dana yang tidak dapat dimanfaatkan yaitu sebesar Rp. 3.330.754.016,- (22%), jumlah ini jika dapat dimanfaatkan secara maksimal tentunya akan lebih meningkatkan manfaat dari tujuan penganggaran BOS yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan khususnya yang terkait langsung dengan guru, tenaga pendidikan, tenaga administrasi dan siswa sekolah.

Kata Kunci: *BOSDA, BOSNAS, Kinerja Keuangan Sekolah, Pengelolaan Dana.*

Abstract

This study aims to know and to do the implementation of local and national government fund program towards the performance of senior high school city level in samarinda has been running with applicable regulation or not and also to find out the financial management in this case the expenditure. This research is about 18 senior high school level in Samarinda City. In this study using descriptive research with a quantitative approach. This study shows the results that the Implementation of the National School Operational Assistance Program (BOSNAS) and Regional Middle School Operational Assistance (BOSDA) in Samarinda City have met the stipulated regulations. Financial management in this case is the expenditure / realization of the National School Operational Assistance Program (BOSNAS) and Regional Operational Assistance (BOSDA) impacting the performance of State High Schools in Samarinda City. Funds allocated for 18 schools in Samarinda city sourced from BOSNAS and BOSDA amounted to Rp. 27. 917,500,000 while the realization was Rp. 24,586,745,984 or 88%. Funds that cannot be used are Rp. 3,330,754,016 (22%), this amount, if it can be utilized optimally, will certainly further increase the benefits of BOS budgeting objectives, namely to improve the quality of education services, especially those directly related to teachers, education staff, administrative staff and students school.

Keyword: *BOSNAS, BOSDA, Fund Management, School Financial Performance*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu aset nasional yang mendasar dan faktor penentu utama bagi keberhasilan pembangunan, maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki landasan yang berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.

Upaya yang paling strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi Negara dan bangsa Indonesia, sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berarti dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang

tercermin dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan "... Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...". untuk maksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang relevan dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergantung pada kualitas pendidikan, terutama pendidikan formal dapat dilihat melalui proses belajar mengajar yang diselenggarakan pihak sekolah bagi seluruh peserta didiknya. Namun pada kenyataannya, dalam upaya pemenuhan pendidikan yang berkualitas, banyak sekali ditemukannya berbagai masalah atau kendala yang muncul. Pada umumnya, masalah atau kendala itu adalah terkait permasalahan pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, seperti kurang memadainya sarana dan prasarana yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan proses belajar mengajar di berbagai sekolah. Suatu proses merupakan hal yang terpenting dalam pencapaian suatu tujuan. Maka, proses belajar yang optimal akan dapat mendidik para siswa-siswi menjadi pribadi yang memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan, kemampuan serta daya saing sebagai dasar untuk menempuh tingkatan pendidikan yang selanjutnya. Dan tujuan pendidikan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Defnisi operasional adalah batasan-batasan terhadap lingkup variabel yang merupakan indikator penting sebagai penentu keberhasilan penelitian dan menghindari interpretasi yang lain terhadap variabel yang diteliti. Variabel yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) yaitu program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar".
- b. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yaitu program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur kepada SMA lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Komponen yang dibiayai oleh program BOSNAS dan BOSDA yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah :
 1. Pengembangan Perpustakaan
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
7. Lngganan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Pembayaran Honor
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

d. Kinerja Sekolah

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia "*kinerja*" adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlukan, kemampuan kerja. Pengertian tentang kinerja sekolah yaitu hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sekolah dalam melakukan kegiatan-kegiatan sekolah sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan untuk sekolah. Kata "*kinerja*" dalam bahasa indonesia adalah terjemahan dari kata dalam bahasa inggris "*performance*" yang berarti pekerjaan, perbuatan, penampilan atau pertunjukan. Kirk patrick dan Nixon dalam Sagala (2006:179) mengartikan kinerja sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (direncanakan) sebelumnya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kinerja adalah persentase realisasi pelaksanaan BOSNAS dan BOSDA pada masing-masing sekolah dan persentase kolektif pemanfaatan dana BOSNAS dan BOSDA di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dikumpulkan melalui teknik pengumpulan yaitu, kuesioner dan dokumentasi. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) APBN dan APBD Provinsi dan Kota Samarinda.
2. Dokumen Realisasi pelaksanaan program BOSNAS dan BOSDA kota Samarinda Tahun 2018.
3. Kajian Kepustakaan
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) terhadap Kinerja Sekolah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah.
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019.
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah atas di provinsi Kalimantan timur perlu diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (Zulfikar & Fajri AF, 2023). Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh (Sugiyono, 2015) yaitu : "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Gandhi Mahardika et al., 2023).

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis dan menjelaskan permasalahan yang ada menggunakan alat analisis diskriptif kuantitatif (Hariswati, 2015). Dimana untuk setiap komponen kegiatan BOSNAS dan BOSDA menjadi titik bahasan didalam pelaksanaan kegiatan, sementara untuk mengukur kinerja sekolah digunakan analisis kuantitatif menyangkut pagu anggaran, realisasi anggaran dan kinerja anggaran pada masing-masing sekolah terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan dana BOS di kota Samarinda (Ghozali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 "Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah"

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya non-operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, "Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar".

Prinsip dasar tujuan pemerintah memberikan dana bantuan BOSNAS dan BOSDA adalah untuk meringankan dan membantu biaya Operasional sekolah dan meningkatkan kualitas anak didik sampai dengan tingkat SMA.

1. Pengembangan Perpustakaan

Realisasi anggaran BOSNAS sebesar Rp 2.918.795.645 atau 5,9 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, sebesar Rp. 17.147.200.000,- diperuntukan bagi 18 sekolah untuk dimanfaatkan mengembangkan perpustakaan sekolah. Sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp. 26. 500.000,-.

Alokasi untuk perpustakaan sebesar 17 persen belum optimal karena seharusnya menurut ketentuan rasio buku per siswa 1:10 , dalam pelaksanaan ternyata dana yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada, besarnya alokasi untuk pengembangan perpustakaan alokasi untuk pengembangan perpustakaan sudah mendekati angka maksimal 20 persen. Jika dilihat dari kebutuhan rasio buku dengan siswa seharusnya perbandingannya yang ideal 1:10. Rendahnya rasio buku persiswa disebabkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur harga eceran tertinggi, sementara ketersediaan dana bos jika mengacu kepada kondisi wilayah dimana harga di jawa dan diluar jawa walaupun di bawah HET namun relative lebih tinggi dari harga normal di jawa (Depiani, 2015).

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

Biaya dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), realisasi anggarannya sebesar Rp 636.409.904 atau 3,7 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah untuk dimanfaatkan penerimaan peserta didik baru, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp. Rp 577.285.003.

Dana yang digunakan sudah mencukupi namun sebaiknya dana Penerimaan siswa baru untuk setiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang mendaftar disekolah masing-masing, karena jumlah siswa baru yang mendaftar di beberapa sekolah tidak seimbang sebagai contoh, untuk sekolah favorit batas kuota yang diterima 1000 pendaftar, sementara untuk sekolah yang non favorit dengan kuota yang sama jumlah pendaftarnya

relative lebih rendah dari sekolah favorit. Bagi sekolah favorit dana yang dialokasikan untuk penerimaan siswa baru menjadi lebih besar, yang mengakibatkan berkurangnya alokasi kegiatan lainnya yang bersifat teknis dari pagu yang dialokasikan.

Sementara untuk penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tes bakat skolastik/tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah belum semua sekolah melakukan hal tersebut. Dari 18 sekolah yang baru melaksanakan kegiatan tersebut kurang dari 50 persen.

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran, Pembelian alat-alat habis pakai praktikum dalam materi pembelajaran SMA, antara lain praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer, olahraga, kesenian, keterampilan/prakarya dan kewirausahaan, realisasi anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp1.672.383.354 atau 9,8 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah untuk dimanfaatkan Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran, Pembelian alat-alat habis pakai praktikum dalam materi pembelajaran SMA, antara lain praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer, olahraga, kesenian, keterampilan/prakarya dan kewirausahaan, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 2.065.274.775.

Pelaksanaan terkait dengan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pada kenyataannya belum semua sekolah dapat melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya alokasi dana disetiap sekolah, hal ini diindikasikan dengan banyaknya kegiatan yang tidak bisa mengalokasikan honorarium bagi pelaksana serta tidak mampu untuk membeli peralatan praktikum IPA, IPS dan Bahasa.

4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian nasional, dan/atau USBN. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan, realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.811.234.106 atau 10,6 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah untuk dimanfaatkan kegiatan evaluasi pembelajaran, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp. 1.403.338.635,-

Dalam merencanakan kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian nasional, dan/atau USBN, masih terdapat beberapa kendala khususnya terkait dengan dukungan pembiayaan. Penyebab belum optimalnya pelaksanaan perencanaan tersebut dikarenakan penyusunan perencanaan tahun berjalan digunakan sebagai rencana pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran untuk tahun berikutnya (tahun depan), dimana kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat sering terjadi perubahan baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun pendukung lainnya yang berdampak

terhadap meningkatnya kebutuhan dana.

5. Pengelolaan Sekolah

Realisasi anggaran untuk pengelolaan sekolah sebesar Rp. 2.466.935.367,- atau 14,4 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan untuk pengelolaan sekolah, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp1.510.041.219,-

Untuk pengelolaan dana sekolah masih belum bisa dilaksanakan secara optimal hal ini disebabkan antara lain :

- Semua sekolah telah melakukan Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan, hal ini sesuai dengan intruksi pemerintah dimana absensi dengan elektronik ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kehadiran guru dan staf tu dalam rangka meningkatkan kinerja. Sementara untuk mendisiplinkan kehadiran siswa agar tepat waktu serta sebagai alat control bagi orang tua siswa, disarankan juga menggunakan finger print sebagai absensi kehadiran siswa disekolah.
- Pembiayaan untuk membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara website sekolah dengan domain "sch.id". Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan/atau jasa profesi pengembang website, untuk awal penyiapan fasilitas web dapat terlaksana disemua sekolah, sementara pembiayaan untuk melakukan update dan pemeliharaan data belum tersedia secara memadai dan cenderung malah dibeberapa sekolah untuk pembiayaan bagi operator web dan jaringan tidak tersedia.

6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.

Realisasi anggaran sebesar Rp 174.787.500 ,- atau 1 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan untuk Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 541.174.300 ,-

Salah satu tujuan pemberian dana operasional sekolah adalah Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah agar tujuan utama untuk melahirkan siswa-siswa sekolah yang handal dan berkualitas yang mana dalam undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan dioptimalkan yaitu : pemantapan penerapan kurikulum/silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan/atau penerapan program penilaian kepada peserta didik; dan/atau, peningkatan kualitas manajemen dana dministrasi sekolah. Yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah sebaiknya alokasi untuk kegiatan ini dipisahkan dan dialokasikan khusus didalam

dana bos dengan mempertimbangkan peningkatan kapasitas tenaga pendidikan sesuai dengan strata pendidikan (S1, S2, S3).

7. Langganan Daya dan Jasa

Realisasi anggaran sebesar Rp1.816.685.728,- atau 10,6 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan langganan daya dan jasa, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp94.091.813,-.

Salah satu penunjang yang sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar penyediaan layanan daya dan jasa harus tersedia secara memadai, khususnya dalam hal ini untuk menunjang proses administrasi yang secara nyata banyak menggunakan peralatan yang memerlukan daya listrik, lebih khusus lagi terkait dengan kegiatan lab dan sarana praktikum. Penyelenggaraan penyediaan di 18 sekolah yang ada di samarinda, masih terdapat masalah sebagai berikut :

- Belum semua sekolah memiliki power plan (cadangan sumber daya listrik) yang dapat membackup jika penyediaan layanan sumber daya listrik (PLN) bermasalah.
- Tidak tersedia cadangan biaya jika perencanaan pembiayaan penggunaan layanan sumber daya listrik yang direncanakan untuk tahun depan akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan tariff daya listrik.
- Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per bulan. Pada kenyataannya kebutuhan untuk menunjang paket/ voucer penggunaan internet melebihi dari batas maksimum yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pengembangan system informasi disekolah.

8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, Realisasi anggarannya sebesar Rp1.138.556.216,- atau 6,6 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 2.957.787.000,-

Tidak berfungsinya sarana prasarana sekolah secara optimal akan berpengaruh terhadap pelayanan administrasi dan pendidikan. Alokasi dana bos sangat membantu bagi sekolah untuk melakukan pemeliharaan untuk berkala. Pada beberapa kondisi pemeliharaan sarana prasarana sekolah tidak sekedar untuk menjaga kondisi saja tetapi membutuhkan yang sifatnya perbaikan secara permanen. Beberapa persoalan yang dihadapi sekolah dalam melakukan pemeliharaan belum optimal, hal ini disebabkan oleh kondisi geografis kota samarinda umumnya berada dibawah permukaan sungai Mahakam, bila datang musim hujan sering terjadi banjir yang menggenangi lingkungan sekolah, pada kondisi tertentu malah banjir masuk diruang belajar. Diharapkan dana pemeliharaan sekolah bisa

ditingkatkan jumlah anggarannya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

9. Pembayaran Honor

Pada prinsipnya pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan honor guru yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan. Dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran kekurangan honor guru pada jenjang SMA. Realisasi anggaran sebesar Rp321.345.500,- atau 1,9 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 yang diperuntukan bagi 18 sekolah dimanfaatkan untuk pembayaran kekurangan honor guru pada jenjang SMA, sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 2.957.787.000,-.

Salah satu factor pendukung untuk meningkatkan tenaga pendidikan dan kependidikan komponen pembiayaan insentif berupa honorarium menjadi sangat penting untuk kelancaran peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan disekolah. Honorarium yang diberikan melalui biaya operasional sekolah khususnya yang bersumber dari dana APBN standar honor tidak mengacu pada kesulitan kondisi geografis tetapi mengacu kepada standar nasional dan juga tidak memperhatikan indeks kemahalan. Sementara alokasi yang disediakan oleh bosda sudah mengacu kepada satuan biaya kota samarinda. Yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan pendidikan khususnya terkait dengan pemberian insentif tidak bergantung pada dana bosda, karena dana yang tersedia pada APBD kota tergantung kepada dana bagi hasil dari pemerintah pusat, yang nilainya fluktuatif setiap tahunnya.

10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

Realisasi anggaran Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran sebesar Rp1.530.277.834 atau 8,9 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 17.147.200.00 sementara untuk realisasi Bosda sebesar Rp 601.998.088,-.

Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran untuk semua sekolah telah dilakukan sesuai dengan peruntutannya. Masih terdapat kekurangan alat multimedia khususnya terkait dengan rasio antara jumlah murid dengan peralatan multimedia, sehingga efektivitas kurang tercapai karena jumlah murid tidak sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penggunaan alat multimedia ini sangat vital karena berhubungan langsung dengan kebutuhan siswa khususnya pada saat kegiatan UNBK dan penunjang lainnya.

Secara keseluruhan untuk mengetahui kinerja dana BOSNAS dan BOSDA yang telah di alokasikan untuk Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat dilihat oleh tabel 1 berikut ini:

SUMBER BIAYA BOS	RINCIAN		Persentase (%)
	RKAS	REALISASI	
BOSNAS	Rp 17.147.200.000	Rp 14.487.411.152	84
BOSDA	Rp 10.770.300.000	Rp 10.099.334.832	94
Total	Rp 27.917.500.000	Rp 24.586.745.984	88

Tabel. 1 Alokasi dana BOSNAS dan BOSDA Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
 Sumber: Peneliti (Diambil dari data-data realisasi keuangan persekolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana yang dialokasikan untuk 18 sekolah yang ada di kota Samarinda yang bersumber dari BOSNAS dan BOSDA berjumlah Rp. 27. 917.500.000,- sementara realisasi sebesar Rp. 24.586.745.984,- atau sebesar 88%. Jika dilihat dana yang tidak dapat dimanfaatkan nilainya cukup besar yaitu sebesar Rp. 3.330.754.016,- (22 %), jumlah ini jika dapat dimanfaatkan secara maksimal tentunya akan lebih meningkatkan manfaat dari tujuan penganggaran BOS yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan khususnya yang terkait langsung dengan guru, tenaga pendidikan, tenaga administrasi dan siswa sekolah.

SIMPULAN

Mewujudkan kehidupan dan kecerdasan manusia Indonesia merupakan amanat UUD 1945 yang merupakan tujuan mulia agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera, lebih khusus lagi dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang handal, cerdas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan amanat tersebut dan diimplementasikan telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 "Dana BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah dan kewajiban daerah yang juga harus dipenuhi untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD yang dikenal dengan BOSDA". Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda telah memenuhi regulasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan dalam hal ini adalah pengeluaran/realisasi Program Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan

Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) berdampak terhadap Kinerja Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Depiani, D. (2015). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Manajer Pendidikan*, 9(2), 302–314. <https://www.neliti.com/id/publications/270762/efektivitas-pemanfaatan-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos>
- Gandhi Mahardika, S., Shadiqul Fajri, M. A., Bustami, A., Ramadhan Ain Fitriah, R., & Yuningsih, I. (2023). *Perceptions of civil servant towards sharia bank service: evidence from employees on public works and spatial planning department in Samarinda city*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariswati, N. (2015). Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bos. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 75. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.75-88>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Zulfikar, A. L., & Fajri AF, M. S. (2023). Causality Analysis of The Money Supply and Interest Rate and Its Effect on Inflation and Investment in Indonesia. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 1(03), 98–103. <https://doi.org/10.58812/esee.v1i03.71>